

PENDAHULUAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau disebut Bank Sultra mengapresiasi bahwa tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam memperoleh dan mempertahankan kepercayaan para *stakeholders*, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal peran dan tanggung jawab, minimalisasi risiko, serta dalam mendukung integritas organisasi. Bank Sultra juga berkomitmen dan berusaha dalam mengelola bisnisnya senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika serta penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga disamping tujuan strategi bisnis Bank Sultra dapat tercapai juga diharapkan dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank terkemuka di Sulawesi Tenggara

Misi : 1. Menjadi Bank Umum yang sehat, terpercaya dan inovatif.

2. Meningkatkan kualitas layanan.

3. Berpartisipasi dalam pembangunan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Bank Sultra terus berupaya meningkatkan layanan pada semua stakeholder, baik kualitas sumber daya manusia maupun teknologi serta tata kerja yang mendukung peningkatan kinerja. Untuk itu, telah ditetapkan kebijakan tata kelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank yang diinginkan.

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja Bank. Laporan Pelaksanaan GCG merupakan bentuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan

GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, yang mewajibkan bank-bank agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan GCG

Dalam pelaksanaannya, Bank Sultra menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* atau disebut *TARIF* dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu mensyaratkan keterbukaan bank kepada semua stakeholders melalui pengungkapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas tentang kondisi bisnis Bank.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan peran dan fungsi masing-masing organ bank, baik organ utama maupun organ pendukung, keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi, maupun fungsi lain yang menunjang manajemen bank agar berjalan efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu implementasi tanggungjawab bank sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dengan pertimbangan bahwa kondisi Bank harus mampu berperilaku dan atau bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizenship*)
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Bank harus profesional, tanpa adanya benturan kepentingan dan bebas intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa berusaha agar mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dan Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Dalam prinsip ini tersirat bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang

maupun peraturan perusahaan.

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini dapat menghindari praktek-praktek tercela seperti perbuatan *fraud* (penggelapan), *self-dealing* dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Struktur dan Mekanisme GCG

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, organ Perseroan (Bank) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Sultra, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko.

Sebagai wujud pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governanace*, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2014 untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* dan merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank Sultra pada peraturan yang berlaku. Dalam laporan ini, *assesment* GCG dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance*

structure untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur, *governance process* menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur, dan *governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2014 tertuang dalam laporan berikut :

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal 26 Maret 2015 bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun Buku 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2014 dan mengesahkan laporan keuangan dan perhitungan laba rugi Perseroan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. BAMBANG SUDARYONO & Rekan sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal 31 Desember 2014 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Menyetujui dan menerima baik penjelasan Direksi mengenai kegiatan Perseroan periode Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et d'charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2014 sejauh tindakan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan Direksi dan laporan keuangan tersebut.
4. Menugaskan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Rapat juga memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium Akuntan Publik dimaksud.
5. Menyetujui dan mengesahkan penambahan modal disetor dari Rp. 217.976.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) menjadi Rp. 274.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan jumlah penambahan sebesar Rp. 56.724.000.000,- (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah)
6. Menyetujui penyaluran Dana Desa dan Dana Sertifikasi Guru di wilayah Sulawesi Tenggara melalui Bank Sultra dengan pertimbangan utama, jaringan Kantor Bank Sultra secara online telah menjangkau seluruh Sulawesi Tenggara.
7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui untuk mengusahakan pemberian tambahan modal kepada PD. Utama Sultra dalam rangka penyelesaian

tunggakan kredit yang ada di Bank Sultra. Disamping itu Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk melakukan penghapusan tunggakan bunga dan denda selama rentan waktu antara timbulnya tagihan dan mulai beroperasinya DPPU dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak otoritas

8. Menyetujui penetapan calon Komisaris baru, sambil menunggu hasil Fit and Propert Test oleh Otoritas Jasa Keuangan atas calon Komisaris yang telah diusulkan
9. Pembagian Jasa produksi Tahun 2014 sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pengurus dan Pegawai secara proporsional dengan pembagian 2,25% (dua koma dua lima persen) untuk Pengurus dan 12,75% (dua belas koma tujuh lima persen) untuk Pegawai.
10. Menyetujui dan Mengesahkan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan sebagai Pemegang Saham baru pada Bank Sultra.
11. Remunerasi dan fasilitas yang akan diberikan kepada Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sesuai dengan komposisi tahun sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :

Penghasilan lain :

- a. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing minimum sebesar 1 (satu) kali penghasilan.
- b. Uang Cuti Tahunan hanya diberikan kepada Direksi yaitu sebesar 1 (satu) kali penghasilan.
- c. Bonus hanya diberikan kepada Direksi yaitu sebesar maksimal 3 (tiga) kali penghasilan.

- d. Jasa Produksi diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) per 15% (lima belas persen) dari total jasa produksi.
 - e. Jasa Pengabdian :
 - untuk Dewan Komisaris diberikan kepada Komisaris Utama paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jasa penghargaan yang diterima oleh Direktur Utama dan bagi Komisaris 90% (sembilan puluh persen) dari yang diterima oleh Komisaris Utama.
 - untuk Direksi diberikan Maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari laba setelah pajak dari tahun buku sebelumnya yang diberikan kepada Direksi secara bersama-sama;
 - f. Penghargaan hanya diberikan kepada Direksi sesuai dengan kemampuan bank yaitu maksimum sebesar 48 (empat puluh delapan) kali penghasilan terakhir yang diterima (untuk 1 (satu) periode jabatan) dalam hal bank berada dalam kondisi laba.
12. Menyetujui tambahan penyertaan modal Perseroan sehingga modal inti sebagaimana yang diharapkan dapat dipenuhi, sehubungan dengan program BPD Regional Champion Jilid II yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Salah seorang anggota Dewan Komisaris

diangkat sebagai Komisaris Utama. Namun demikian pada bulan Desember 2014, anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, dan pada tahun 2014 Komisaris Utama mengundurkan diri, sehingga susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank Sultra sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

- Drs. H. Jahja Mallisa : Anggota
- Drs. H. Suma Sanggo : Anggota

Masa Jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.

Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Sultra belum sepenuhnya sesuai regulasi Bank Indonesia namun memenuhi ketentuan tentang *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Bank Indonesia/OJK, larangan rangkap jabatan, dan keberadaan Komisaris Independen.

Independensi anggota Dewan Komisaris

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, menetapkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak independen.

Terkait hal tersebut, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris

tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 % atau lebih, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Bank, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- c. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf d, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- f. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf d, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku

- g. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf f, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- h. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- i. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- j. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk :
- Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- k. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah, namun kedua komite tersebut disatukan.
- l. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada huruf k dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- m. Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud huruf j menjalankan tugasnya secara efektif
- n. Komite sebagaimana dimaksud huruf j telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.
- o. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- p. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud huruf o telah mencantumkan :
- pengaturan etika kerja;
 - waktu kerja;
 - pengaturan rapat.
- q. Dewan Komisaris senantiasa menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada pelaksanaan bisnis bank, pelaksanaan fungsi kepatuhan, kecukupan dan tindak lanjut Audit Intern dan pengurusan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris senantiasa memberi masukan kepada Direksi baik dalam bentuk saran maupun rekomendasi sebagai implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan peningkatan kemampuan pengetahuan perbankan dalam menghadapi persaingan antar Bank guna meningkatkan pertumbuhan Bank
2. Pembinaan proses *screening* sejak dari penjurangan calon pegawai, relevansi pelatihan yang memadai, penempatan tugas sesuai kompetensi dan pelaksanaan tanggung jawab supervisi secara berjenjang.
3. Penyempurnaan struktur organisasi maupun uraian tugas yang jelas dan terstruktur sebagai konsekuensi perubahan status BPD Sultra menjadi Bank Sultra.
4. Ekspansi dari sisi pembukaan kantor operasional telah mempertimbangkan beban yang akan timbul dan dari sisi ekspansi kredit. Direksi membuat *action plan* untuk kredit produktif yang tidak lancar.
5. Surat Keputusan maupun laporan-laporan operasional Bank, telah

disampaikan oleh Direksi tepat waktu.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat juga diambil diluar rapat Dewan Komisaris sepanjang semua anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1
Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

Dewan Komisaris	Kehadiran	
	Jumlah	%
H.Zainal Abidin	1	25%
H.Jahja Mallisa	3	75%
H.Suma Sanggo	4	100%

Tabel 2

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

Hari/Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Jumat, 03 Januari 2014	Hasil pemeriksaan sementara auditor Kantor Akuntan Publik terhadap Bank Sultra	1. H. Suma Sanggo (Komisaris) 2. Sapto Dewo (KAP) 3. Eko Hendarto (KAP)
Rabu, 12 Februari 2014	1. Struktur Organisasi Bank Sultra 2. Job Description masing-masing unit kerja 3. Peraturan Kepegawaian Bank Sultra 4. Draf struktur penggajian dan komponen-komponen penghasilan lainnya	1. H. Zainal Abidin (Komisaris Utama) 2. H. Jahja Mallisa (Komisaris) 3. H. Suma Sanggo (Komisaris) 4. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama) 5. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 6. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 7. Hj.Hayati Hasan (Direktur Umum) 8. Samaluddin (Sekretaris Dewan Komisaris)
Senin, 16 Juni 2014	1. Kinerja Operasional Periode Triwulan I/2014 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H. Jahja Mallisa (Komisaris) 2. H. Suma Sanggo (Komisaris)
Rabu, 08 Oktober 2014	1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) s/d Triwulan III tahun 2014 2. Surat Direktur Utama Bank Sultra No. 164/135.000/10/2014/ PRC tanggal 01 Oktober 2014	1. H. Jahja Mallisa (Komisaris) 2. H. Suma Sanggo (Komisaris) 3. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama) 4. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 5. H.Hasbi Arfa (Kadiv.)

	perihal Penyampaian Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2015	Perencanaan) 6. Tatiek Maliaty (Kativ. Perkreditan) 7. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 8. Samaluddin (Sekretaris Dewan Komisaris) 9. Eko Andrian HALim (Ketua Kelompok Auditor II SKAI)
--	---	---

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2014

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan lainnya yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2014, adalah :

Tabel 3

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2014

Komisaris	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
H.Jahja Mallisa	1. Penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan Efektif	Asbanda	06-09 Feb 2014
	2. Workshop Mengendalikan 3 Risiko Sistemik	RMI	20-25 Aug 2014
H.Suma Sanggo	1. Sosialisasi LHBU		17-19 Feb 2014
	2. Workshop Mengendalikan 3 Risiko Sistemik	RMI	20-25 Aug 2014

Secara keseluruhan hasil *self assessment* pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris berada pada peringkat 2 (Baik). Pada tahun 2014 seorang

anggota Dewan Komisaris memasuki masa pensiun sehingga pada akhir tahun 2014 anggota Dewan Komisaris hanya berjumlah 2 (dua) orang dan keduanya adalah anggota Dewan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris yang lain. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian *self assessment* tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris yang belum maksimal dari segi struktur, proses dan hasil.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi

Sejak perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/109/KEP GBI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Pengalihan Izin Usaha dari PD. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, susunan Direksi Bank Sultra per 31 Desember 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 695 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Bank Sultra, menjadi :

- Direktur Utama : Khaerul Kemala Raden
- Direktur Kepatuhan : La Utu
- Direktur Umum : Hayati Hasan
- Direktur Pemasaran : Budiman Junus

Selanjutnya pada RUPS Tahun Buku 2013 diusulkan Saudara Depid sebagai calon Direktur Pemasaran dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun menggantikan Saudara Budiman Junus. Setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor 440 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Bank Sultra, Saudara Depid diangkat sebagai Direktur Pemasaran, selanjutnya susunan Direksi Bank Sultra menjadi :

- . Direktur Utama : Khaerul Kemala Raden
- . Direktur Kepatuhan : La Utu
- . Direktur Umum : Hayati Hasan
- . Direktur Pemasaran : Depid

Independensi Direksi

Keanggotaan Direksi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, tidak rangkap jabatan, tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang dapat menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia, seluruh Direksi tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, namun salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan.
- Direksi menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diuar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi senantiasa berupaya agar tetap mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- Direksi telah melaporkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembidangan Tugas Direksi

Tabel 4
Pembidangan Tugas Direksi Bank Sultra

Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
Khaerul Kemala Raden	Direktur Utama	Koordinasi pengelolaan Bank Sultra, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> ● SKAI ● Perencanaan ● <i>Corporate Secretary</i> ● SKMR
La Utu	Direktur Kepatuhan	<i>Compliance</i> , UKPN, serta Hukum dan Litigasi, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> ● Compliance dan UKPN ● Hukum dan Litigasi
Hayati Hasan	Direktur Umum	HRD dan Teknologi Sistem Informasi, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> ● Keuangan dan Akuntansi ● SDM dan Umum ● Teknologi Sistem Informasi
Depid	Direktur Pemasaran	Pengelolaan Dana, Likuiditas dan perkreditan, membawa Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> ● Treasury ● Perkreditan

Frekuensi Rapat Direksi

Selama Tahun 2014, Direksi mengadakan rapat sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. Frekuensi rapat Direksi maupun Direksi dengan Staff dan/atau Direksi dengan Auditor eksternal selama tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5
Rapat Direksi Tahun 2014

Dewan Komisaris	Kehadiran	
	Jumlah	%
Khaerul Kemala Raden	42	95%

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
----	----------	--------------	---------------

La Utu	40	91%
Budiman Junus	9	20%
Hayati Hasan	42	95%
Depid	11	25%

Tabel 6
Materi Rapat Direksi Tahun 2014

1.	Jumat, 03 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi PT.BPD Sultra tentang Penghargaan atas Masa Kerja Pegawai Bank Sultra. 2. Memo Tim Pengembangan dan Implementasi Outsource Switching PT.BPD Sultra. 3. Surat KPPN Kolaka No S-881/WPB.27/KP.0430/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal Penyediaan Layanan Internet Banking (Cash Management System) pada Bank Persepsi. 4. Surat Dewan Komisaris PT.BPD Sultra Nomor 009/Dekom.BPD/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2013. 5. Penawaran seminar sosialisasi Mata Rantai Resources. 6. Kasus Hukum Sdr.Ramli (sopir Capem Lasusua PT.BPD Sultra) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hayati Hasan (Direktur Umum)
2.	Rabu, 08 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Sdri Yetty Octavia Chandra (anak almarhum Aleang) perihal penawaran harga RUmah/Ruko eks almarhum Aleang. 2. Memo SKAI PT.BPD Sultra perihal pemeriksaan khusus pegawai an.Waode Rita Mustika. 3. Risalah Rapat Dewan Komisaris PT.BPD SULtra dengan auditor KAP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hayati Hasan (Direktur Umum)
3.	Jumat, 10 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Dewan Komisaris PT.BPD Sultra tanggal 09 Januari 2014. 2. Proposal peran Perusahaan /BUMN/BUMD dalam program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan)

		<p>kota layak anak.</p> <p>3. Laporan hasil Bipartit.</p> <p>4. Proposal turnamen sepak bola Danlanud Cup X.</p> <p>5. Memo Divisi Kredit perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2013.</p> <p>6. Memo Divisi SDM&Umum perihal Rencana Pelaksanaan HUT PT.BPD Sultra ke 46 & rencana HUT Sultra yang ke 50.</p> <p>7. Memo Divisi SDM&Umum perihal Rancangan SK Pemberian Cuti.</p>	<p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>
4.	Jumat, 22 Januari 2014	<p>1. Hasil Rapat OJK di Jakarta</p> <p>2. Surat Dewan Komisaris PT.BPD Sultra</p> <p>3. Surat PT.BPD Sultra Cabang Kolaka</p> <p>4. Hasil Rapat DPP PT.BPD Sultra</p> <p>5. Surat SKAI PT.BPD Sultra</p> <p>6. Surat Divisi SDM&Umum perihal Penerimaan Pegawai</p> <p>7. Pembentukan Corporate Secretary</p> <p>8. Surat PT.BPD Sultra Cabang Pasarwajo</p> <p>9. Izin berobat lanjut Sdri Putri Novitasari</p> <p>10. Permohonan kerjasama dari BUAS</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)</p> <p>4. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>

5.	Rabu, 29 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT.BPD Sultra Nomor 010/MRK.KP/BPD/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Hasil Pengurusan Sertifikat Kantor dan Rujab PT.BPD Sultra Cabang Unaaha, Rujab PT.BPD Sultra Cabang Kolaka dan Kantor Kas Mowewe. 2. Surat Dewan Komisaris PT.BPD Sultra Nomor 015/Dekom.BPD/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Evaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013. 3. Tenaga Outsourcing dan Kontrak BPD Sultra. 4. Surat PT.BPD Sultra Cabang Utama Nomor 063/135.001/I.14/KCU tanggal 23 Januari 2014 perihal Permintaan Persetujuan. 5. Surat PT.BPD Sultra Cabang Utama Nomor 075/135.001/1/14/KCU tanggal 27 Januari 2014 perihal Selisih Setoran Tunai 6. Surat ASBANDA Nomor 007/PH/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal luran Khusus Asbanda. 7. Surat OJK Nomor S-157/NB.11/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Penunjukkan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sultra. 8. Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Unhalu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hayati Hasan (Direktur Umum)
----	--------------------------	--	--

6.	Kamis, 05 Februari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat PT.BPD Sultra Capem Punggaluku perihal Perubahan Pembayaran Gaji 2. Pengembangan Produk Anoa Mapan dan Anoa Bisnis PT.BPD Sultra 3. Rancangan Perubahan Peraturan Dana Pensiun 4. Surat Asbanda 5. Proposal Pembangunan Mesjid Al-Mubarak Angata 6. Evaluasi untuk perubahan status pegawai Non Administrasi menjadi pegawai Adminsitrasi 7. Hasil konsultasi PT.BPD Sultra dengan Depnaker perihal persoalan Wd.Rita Mustika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hayati Hasan (Direktur Umum)
7.	Senin, 10 Februari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persoalan Sdr.Ramli (supir Capem Lasusua PT.BPD Sultra) 2. Proposal Turnamen Bola Voli tingkat Karang Taruna se Kabupaten Konawe. 3. Permohonan Dukungan Dana Kejuaraan Catur Walikota Cup I Kota Bau-Bau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hayati Hasan (Direktur Umum)
8.	Rabu, 12 Februari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi PT.BPD Sultra 2. Peraturan Kepegawaian PT.BPD Sultra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin (Komisaris Utama) 2. Jahja Mallisa (Komisaris) 3. Suma Sanggo (Komisaris) 4. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 5. La Utu (Direktur

			<p>Kepatuhan)</p> <p>6. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)</p> <p>7. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>8. Samaluddin (Sek. Dewan Komisaris)</p>
9.	Senin, 24 Februari 2014	<p>1. Surat Asbanda Nomor 006/KPU/II/2014 tanggal 19 Februari 2014</p> <p>2. Laporan hasil Bipartit persoalan Sdri.WD Rita Mustika</p> <p>3. Surat Sdri.Tei Octavia Chandra</p> <p>4. Hasil rapat DPP perihal persoalan Malewong Jaya Utama</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)</p> <p>4. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>
10.	Jumat, 07 Maret 2014	<p>1. Tindak lanjut RUPS tahun buku 2013</p> <p>2. Kedatangan Sdri.Yeti Octavia</p> <p>3. Surat PT.BPD Capem Punggaluku Nomor 43/135.001.02.02.14/Pglk</p> <p>4. Proposal Bantuan Dana Dinas PK Prov. Sultra</p> <p>5. Memo Divisi Kredit PT.BPD Sultra Nomor 212/135.00/2/2014/KRD perihal fee bendahara gaji TK&SD lingkup Dinas Kab.Konsel</p> <p>6. Memo Divisi Kredit Nomor 211/Div.Krd/BPDST/2014 perihal permohonan penggunaan ruangan bekas Divisi TSI Lt.III</p> <p>7. Proposal Jasa Konsultasi pendirian Unit Usaha SYariah PT.BPD Sultra</p> <p>8. Proposal bantuan program</p>	<p>1. Jahja Mallisa (Anggota Komisaris)</p> <p>2. Suma Sanggo (Anggota Komisaris)</p> <p>3. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>4. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>5. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>

		<p>Pemerintah Kota Kendari “Kota Layak Anak”</p> <p>9. Penerbitan buku ‘Dinamika Pembangunan Kota Kendari”</p> <p>10. Memo Divisi Perencanaan PT.BPD Sultra Nomor 031/135.000/02/14/PRC perihal penyampaian telaahan</p> <p>11. Surat Dewan Komisaris Nomor 028/Dekom.BPD/03/2014 tanggal 04 Maret 2014 perihal Kasus Hukum Sdr.Ramli</p> <p>12. Memo Divisi SDM&Umum Nomor 060/135.000/02/14/SDU tanggal 27 Februari 2014 perihal usulan biaya pengadaan sepatu</p> <p>13. Proposal Indonesia’s Got Talent</p>	
11.	Rabu, 26 Maret 2014	Pengajuan penambahan kredit PD.Utama Sultra	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)</p> <p>4. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>
12.	Rabu, 26 Maret 2014	<p>1. Launching Halo Sultra Expo 2014 dan Pementapan HUT Emas Sultra 2014</p> <p>2. Perbaikan Kantor Bank Sultra Cabang Wakatobi</p> <p>3. Proposal Kerjaama PD.Aneka Usaha</p> <p>4. Proposal Jasa Konsultasi pendirian Unit Usaha Syariah</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>

		<p>PT.BPD Sultra</p> <p>5. Proposal IPPMI (Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia)</p> <p>6. Proposal Pemkot Kendari</p> <p>7. Memo Divisi Keuangan & Akuntansi</p> <p>8. Memo Divisi SDM&Umum perihal Usulan Pelaksanaan Lelang Bangunan&Inventaris Kantor</p> <p>9. Memo SKAI Nomor 040/135.000/2/2014/SKAI perihal Peran Pejabat dan Petugas Pemberian Kredit PT.Malewong Jaya Utama</p> <p>10.Memo SKAI Nomor 045/135.000/14/SKAI perihal Laporan Audit Investigasi atas Setoran BPHTB</p> <p>11.Permohonan Peninjauan kembali Pangkat/Golongan Sdri.Sarwati Mokke</p> <p>12.Jasa Penghargaan dan Pengabdian Pegawai PT.BPD Sultra</p> <p>13.Surat Bank Sultra Cabang Utama Nomor 287/235.001/III/14/KCU</p>	
13.	Selasa, 22 April 2014	<p>1. Memo SKAI Nomor 080/135.000/03/14/SKAI perihal Laporan Pemeriksaan lanjutan Pegawai an.WD.Rita Mustika</p> <p>2. Memo Divisi Treasury Nomor 665/135.000/04/14/Trs perihal Usulan Perubahan BMPK Penempatan Dana</p> <p>3. Memo Divisi SDM&Umum Nomor</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>

		<p>105/135.000/04/14/SDU perihal Usulan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas</p> <p>4. Memo Divisi Perencanaan Nomor 134/135.000/03/2014/Prc perihal Penyaluran CSR</p> <p>5. Proposal dukungan dana Yaysan Pondok Pesantren Minhajut Thullab desa Andoolo Utama Kec.Buke Kab.Konsel</p> <p>6. Proposal dukungan dana Komando Resort Militer 143/HALUOLEO Batalyon infanteri 725/Woroagi</p> <p>7. Proposal dukungan dana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana</p> <p>8. Penyelesaian Panjar an.Alm.Rizal Arifin</p>	
14.	Rabu, 14 Mei 2014	<p>1. Mutasi dan rotasi Bank Sultra</p> <p>2. Permohonan izin Kadiv Perencanaan selaku Ketum perkumpulan Golf Bank Sultra</p> <p>3. Penawaran pembuatan video mobile mini ATM Bank Sultra</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>
15.	Selasa, 10 Juni 2014	<p>1. Pengadaan sepatu dan baju dinas pegawai PT.BPD Sultra</p> <p>2. Proposal PBVSI Pros.Sultra</p> <p>3. Proposal PBVSI Kota Kendari</p> <p>4. Proposal Mesjid Nurul Ilmi</p> <p>5. Proposal Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU</p> <p>6. Persoalan Asrida Puji Astuti</p> <p>7. Proposal Nusantara Expo&Forum</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>3. Hadiman (Kadiv SDM & Umum)</p>

		8. Proposal bantuan dana SMAN 1 Kendari 9. Proposal Downhill Kendari 10. Proposal PKK Tim Penggerak Prov. Sultra	
16.	Kamis, 26 Juni 2014	Memo Divisi Perencanaan Nomor 075/135.000/14/PRC tanggal 25 Juni 2014 perihal Penawaran Kerjasama	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum)
17.	Rabu, 02 Juli 2014	1. Buka Puasa bersama Pemda Prov Sultra dengan Bank Sultra 2. Pasar Murah Pemda Prov. Sultra	1. La Utu (Direktur Kepatuhan) 2. Hayati Hasan (Direktur Umum) 3. Hadiman (Kadiv SDM & Umum) 4. L.M. Mustika (Kepala Cabang Utama) 5. Tatiek Maliaty (Kadiv Kredit & Pemasaran) 6. Ardiyanti Amin (Kabag RKA) 7. Herman H. Ali (Kabag SDM) 8. Irwan Oktivi (Kabag Pemasaran) 9. M. Thaha Luhulima (Kredit) 10. Fauzi Basalamah (Koord Satpam) 11. Wd Nurhuma (Notulen)

18.	Kamis, 10 Juli 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. THR Idul Fitri Tahun 2014 2. Proposal Mahacala Unhalu 3. Pelaksanaan P2WKSS Pemkot Kendari Tahun 2014 4. Proposal Mesjid At-Tarbiyah Kel.Watu-Watu 5. Proposal DISPORA Pariwisata dan EKonomi Kreatif Kota Kendari 6. Proposal Kelompok Kaum Miskin Kota Kendari 7. Proposal Pembangunan Mesjid Nurul Iman Desa Balusuna Kec. Kaledupa 8. Perumahan Griya Bahteramas Nanga-Nanga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum)
19.	Jumat, 11 Juli 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pasar Murah Ramadhan 1435H Tahun 2014M 2. Parcel Hari raya Idul Fitri 1435H 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum)
20.	Kamis, 17 Juli 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan operasional PT.BPD Sultra menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435H/2014M 2. THR Pengurus dan pegawai pensiun PT.BPD SULtra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Hadiman (Kadiv SDM & Umum) 5. Nunung Yunari (Kadiv Treasury) 6. Yuli Siswanto (Kadiv Keuangan&Akuntansi)

			7. Jufri (Plt Kabag.Ops Cabut)
21.	Senin, 21 Juli 2014	1. Surat Bank Sultra Kolaka Nomor 311/135.002/VII/14/Klk tanggal 18 Juli 2014 perihal Usulan keikutsertaan Pasar Murah dalam rangka menyambut Hari raya Idul Fitri 1435H 2. Proposal Pembangunan Gedung Duniaku “Prasarana Pusat Pendidikan Anak Usia Dini”	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum)
22.	Senin, 04 Agustus 2014	Fokus Pemeriksaan BPK	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. Hariyanto (Kadiv Keu & Akuntansi) 3. Tatiek Maliaty (Kadiv Kredit & Pemasaran) 4. L.M. Mustika (Pimp. Cabang Utama) 5. Yasmin Kasim (Pimpcab Unaha) 6. Amran Hasan (Pim capem Punggaluku) 7. Zakaria (Plt. Pimcab Raha) 8. Wd. Nurhuma (Notulen)
23.	Kamis, 07 Agustus 2014	Review Kinerja Bank Sultra	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Hasbi Arfa (Kadiv Perencanaan)

			<p>5. Hadiman (Kadiv SDM & Umum)</p> <p>6. Tatiek Maliaty (Kadiv Kredit&Pemasaran)</p> <p>7. L.M.Mustika (Kadiv Keu &Akuntansi)</p> <p>8. Muh.Suyuti (Kadiv Corsec))</p>
24.	Kamis, 07 Agustus 2014	<p>1. Memo Divisi Keuangan dan Akuntansi PT.BPD Sultra perihal Usulan Pengakuan Pendapatan Bank</p> <p>2. Dukungan partisipasi dalam rangka memperingati HUT ke 69 Kemerdekaan RI Tahun 2014</p> <p>3. Surat PT.BPD Sultra Raha perihal permohonan Biaya Pameran Pembangunan Daerah 2014</p> <p>4. Surat PT.BPD Sultra Ereke perihal Permohonan Persetujuan Biaya</p> <p>5. Surat PT.BPD Sultra Bombana perihal penyampaian Proposal pembangunan Mesjid Baburrahman Kec.Rumbia</p> <p>6. Proposal bantuan dana perbaikan Mesjid Nurushalihin</p> <p>7. Proposal bantuan dana renovasi Mesjid Nurul Amin Kendari</p> <p>8. Penerbitan buku "Kota Kendari menuju Kota Layak Huni (lliveable city)</p> <p>9. Proposal dukungan dana Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Unisula</p> <p>10. Surat Argenta</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>

		<p>11. Ruang Kerja Divisi Kantor Pusat BPD Sultra</p> <p>12. Pembangunan gedung Kantor PT.BPD Sultra Ereke, Bombana dan Asera</p>	
25.	Jumat, 15 Agustus 2014	Surat PT.BPD Sultra Cabang Unaaha Nomor 232/135.005/08/14/Unh tanggal 13 Agustus 2014 perihal permohonan persetujuan biaya.	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p>
26.	Rabu, 19 Agustus 2014	<p>1. Struktur Organisasi PT.BPD Sultra</p> <p>2. Surat Dewan Komisaris PT.BPD Sultra Nomor 053/Dekom.BPD/06/2014 tanggal 17 Juni 2014</p> <p>3. Permasalahan yang berkembang akhir ini</p> <p>4. Memo SKAI Nomor 141/135.000/08/14/SKAI tanggal 15 Agustus 2014</p> <p>5. Memo SKAI Nomor 135/135.000/08/14/SKAI tanggal 14 Agustus 2014</p> <p>6. Memo Divisi SDM&Umum Nomor 237/135.000/08</p> <p>7. Surat dari Pemprov Sultra Nomor 510.13/3661 tanggal 13 Agustus 2014</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Muh.Suyuti (Kadiv Corsec)</p> <p>6. Wd Nurhuma (Notulen)</p>

27.	Jumat, 22 Agustus 2014	Tindak lanjut PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Hadiman (Kadiv SDM & Umum) 6. Hariyanto (Ketua SKAI) 7. H.Herman (Kabag SDM) 8. Amaro Tambunan (Pengurus Sekar) 9. Amaro Tambunan (Pengurus Sekar) 10. Arfianus (Pengurus Sekar) 11. Hasdin Hamzah (Pengurus Sekar) 12. Rahmayanti Ika P (Pengurus Sekar) 13. Sukmawan Tombili (Pengurus Sekar) 14. Alamsyah Patoro (Pengurus Sekar)
28.	Selasa, 26 Agustus 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat PT.Askrida perihal fee base income Asuransi Kredit Konsumtif 2. Surat Gubernur Sultra perihal Bantuan biaya pendidikan mahasiswa S3 3. Penambahan Bandwitch Backhaul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur

		Data Center	Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran)
29.	Jumat, 29 Agustus 2014	1. Pengadaan kalender tahun 2015 2. Progres pengadaan pakaian dinas Direski & Karyawan(i) PT.BPD Sultra 3. Pengalihan kantor PT.BPD Sultra Cab Unaaha&Cab Bau-Bau 4. Divisi Keuangan&Akuntansi 5. Hierarki garis koordinasi Struktur Organisasi PT.BPD Sultra	1. Hayati Hasan (Direktur Umum) 2. Hadiman (Kadiv SDM&&mum) 3. Heri Santoso (Plt.Kadiv TSI) 4. Mickel Mappatunru (Plt.Kabag Umum) 5. Syahrul Firdaus (Kabag pelaporan)
30.	Senin, 01 September 2014	1. Permasalahan kredit di capem Punggaluku 2. Penerimaan Setoran pembayaran PBB 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. Hayati Hasan (Direktur Umum) 3. Depid (Direktur Pemasaran) 4. Hariyanto (Ketua SKAI) 5. Tatiek Maliaty (Kadiv Kredit) 6. Muh.Suyuti (Kadiv Corsec) 7. Amran (Pim Capem Punggaluku)
31.	Kamis, 05 September 2014	Pemberian keputusan atas permohonan sponsorship, penawaran kerjasama, dll	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur

			Pemasaran)
32.	Selasa, 16 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo Divisi SDM&Umum Nomor 188/135.000/09/14/SDU tanggal 15 September 2014 perihal Hasil Survey Hotel 2. Memo Direktur Kepatuhan Nomor 138/Dir.KP/BPD/IX/2014 tanggal 08 September 2014 perihal Penegasan 3. Memo Divisi SDM&Umum Nomor /135.000/09/14/SDU tanggal 09 September 2014 perihal usulan penghapusan aktiva tetap 4. Surat Sekar PT.BPD Sultra Nomor 023/SEKAR-BPDST/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal pembentukan team pengkajian kenaikan gaji 5. Proposal dari panitia MUNAS XII KAGAMA perihal partisipasi Munas XII KAGAMA 6. Proposal Bantuan biaya pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran)
33.	Jumat, 26 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal dukungan dana Pengurus Wredatama RI Provinsi Sultra 2. Proposal dukungan dana HUT TNI ke 69 dari TNI AL Kendari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum)
34.	Senin, 06 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat PT.BPD Sultra Sao-Sao Nomor 755/135.101.01/09/14/Sao tanggal 17 September 2014 perihal Usulan Permohonan Penambahan Sopir 2. Memo Sr Syahrul Firdaus Nomor 0001/135.000/08/14 TIM tanggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum)

		<p>27 Agustus 2014 perihal Pembentukan Tim Penyempurnaan Aplikasi Kredit</p> <p>3. Usulan Materi Kalender PT.BPD Sultra Tahun 2015</p> <p>4. Surat PT.BPD Lasusua Nomor 133/135.002.01/9/14/Lsa tanggal 30 September 2014 perihal permohonan Bantuan Pakaian Olah Raga</p> <p>5. Memo Divisi SDM&Umum Bank Sultra Nomor 199/135.000/09/14/SDU tanggal 29 September 2014 perihal study banding ke beberapa BPD antara lain PT.BPD Bengkulu, PT.BPD Lampung, PT.BPD NTT, PT.BPD NTB,PT.BPD Kalteng, PT.BPD Kalsel</p> <p>6. Surat Asbanda Nomor 358/Pel-H/IX/2014 tanggal 3 September 2014 perihal penyampaian notulen rapat persiapan Porseni</p> <p>7. Memo Divisi SDM&Umum Bank Sultra Nomor 193/135.000/09/14 /SDU tanggal 3 September 2014 perihal Usulan Pemberian Cincin Kenang-kenangan</p> <p>8. Memo Sekretaris Perusahaan Bank Sultra Nomor 049/135.000/09/2014 tanggal 22 September 2014 perihal persetujuan pelatihan</p>	
35.	Rabu, 08 Oktober 2014	<p>1. Evaluasi pelaksanaan RBB s/d triwulan III Tahun 2014</p> <p>2. Laporan pemeriksaan OJK dan BPK Tahun 2014</p> <p>3. Surat Direktur Utama PT.BPD Sultra No</p>	<p>1. Jahja Mallisa (Komisaris)</p> <p>2. Suma Sanggo (Komisaris)</p> <p>3. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p>

		<p>164/135.000/10/2014/PRC tanggal 01 Oktober 2014 perihal Penyampaian Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2015</p> <p>4. Hal-hal lain yang dianggap perlu</p> <p>5. Pembahasan laporan mesin absensi Sdr. La Ode Basaru (Koor. Kantor kas Tomia)</p> <p>6. Pembahasan Laporan absensi bulanan</p> <p>7. Kriteria penghargaan untuk masa kerja pegawai 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun</p> <p>8. Agenda kerja bagian umum tahun 2013</p>	<p>4. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>5. Hasbi Arfa (Kadiv Perencanaan)</p> <p>6. Tatiek Maliaty (Kadiv Perkreditan)</p> <p>7. Muh.Suyuti (Sekretaris perusahaan)</p> <p>8. Samaluddin (Sek. Dewan Komisaris))</p> <p>9. Eko Andrian Halim (Ketua Kelompok Auditor II SKAI)</p>
36.	Rabu, 15 Oktober 2014	Permohonan Bantuan Dana Pendidikan Program Doktor S3	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p>
37.	Selasa, 28 Oktober 2014	Membahas dan memutuskan ha-hal penting lainnya	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Muh.Suyuti (Sekretaris Perusahaan)</p>
38.	Rabu, 05 November 2014	Membahas dan memutuskan ha-hal penting	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur</p>

			Umum) 4. Muh.Suyuti (Sekretaris Perusahaan)
39.	Selasa, 11 November 2014	Membahas penawaran kerjasama yang diajukan oleh PT.Artajasa tentang layanan Integrated Solution National Standard Impelmentation Chip card Spesipication (NSICCS) sesuai surat No 202/AJ/120/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan penawaran Layanan ATM Outsource	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Muh.Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 5. Menachem T.Allo (Divisi TSI) 6. Anon Kuncoro (Divisi TSI) 7. M.Alibaba (Divisi TSI)
40.	Selasa, 18 November 2014	Membahas dan memutuskan ha-hal penting	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Muh.Suyuti (Sekretaris Perusahaan)
41.	Senin, 01 Desember 2014	1. Surat Lintasarta nomor 009/LA/12820/2014 perihal Sewa Areal untuk tower 2. Surat Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) No Sek.ASPI/251/XI/2014 perihal Harga Referensi Kartu ATM/Debit Berbasis Teknologi Chip 3. Surat Asbanda nomor 463/Pel.H/XI/2014 perihal	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muh.Suyuti (Sekretaris

		<p>Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p>4. Surat Asbanda No 488/Pel.H/XI/ perihal Persiapan dan Pencantuman Rencana Implementasi BPDNet pada RBB/RKAT tahun 2015</p> <p>5. Kerjasama PT.BPD Sultra dengan BPR Bahteramas</p> <p>6. Penanggalan surat persetujuan saham PT.BPD Sultra</p> <p>7. Memorandum Divisi Perencanaan perihal Laporan Peninjauan Lokasi Kantor Wilayah DOB Kabupaten Mubar, Buteng dan Busel</p> <p>8. Memo SKAI Nomor 203/135.000/11/14/SKAI perihal Penunjukan Nama-nama Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Keluarga Besar PT.BPD Sultra</p> <p>9. Surat PT.BPD Sultra Cabang Kolaka perihal usulan perbaikan atap gedung kantor kas Bupati Kolaka</p> <p>10.Memo Divisi SDM&Umum perihal usulan penerimaan sopir pada PT.BPD Sultra Cabang Wakatobi dan PT.BPD Sultra Capem Lapai</p> <p>11.Penawaran ruko untuk lokasi kantor PT.BPD Sultra Kas Lapulu</p> <p>12.Surat Sdri Nunung Yunari perihal permintaan persetujuan</p>	Perusahaan)
42.	Kamis, 11 Desember 2014	1. Memo Divisi SDM&Umum Nomor 304/135.000/12/14/SDU perihal Usulan Bonus Tahun 2014	1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur

		<p>2. Draf akta pendirian yayasan kesejahteraan keluarga besar PT.BPD Sultra</p> <p>3. Memo SKAI Nomor 300/135.000/12/14/SKAI perihal Usulan Penambahan Tenaga Auditor</p> <p>4. Memo Divisi SDM&Umum Nomor 307/135.000/12/14/SDU perihal permohonan petunjuk Sdr.Asrul Azis</p> <p>5. Bantuan baju kaos dalam rangka HUT Kab.Bombana</p> <p>6. Surat PT.BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor 532/135.002/12/2014/Klk perihal Kelebihan Kuota BBM</p> <p>7. Unit pelayanan pengaduan kondisi darurat nasabah</p> <p>8. Surat Panitia Pelaksana Penelitian Antropologi Hukum Universitas Halu Oleo Nomor 0010/pan-Pel/A13-FH/XI/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana</p> <p>9. Surat Panitia pelaksana Smeinar regional Akhir Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Nomor 1/PANPEL/V/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana</p> <p>10.Surat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Nomor 004/B/SDC-FPIK UMK/11/2014 perihal permohonan Sponsorhip</p> <p>11.Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan desa Andoolo Utama Nomor 140/296/XI/2014</p>	<p>Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Muh.Suyuti (Sekretaris Perusahaan)</p>
--	--	--	--

		<p>perihal Sumbangan Dana Untuk Kegiatan Lomba Dusun</p> <p>12.Proposal Mekongga Golf Club Pomalaa (MGCP) perihal penawaran Sponsorship</p> <p>13.Surat Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor Puti 4 Nomor 01/PMDG/XII/2014 perihal permohonan Bantuan</p>	
43.	Senin, 29 Desember 2014	<p>1. Kondisi LDR Bank Sultra posisi tanggal 24 Desember 2014</p> <p>2. Rencana pemberian bonus Tahun 2014</p> <p>3. Pengisian Jabatan</p> <p>4. Rencana Pembangunan Cottage Sultra di Pulau Bokori</p> <p>5. Surat Asbanda Nomor 532/Pel.H/XII/2014 perihal Donasi Bencana Alam di Banjar Negara</p> <p>6. Proposal dari Harian Kendari Pos Nomor 8/KP/251/12.2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Permohonan Kerjasama</p> <p>7. Proposal dari PT.Jatelindo Perkasa Abadi perihal permohonan pengajuan Switching PLN</p> <p>8. Memo Divisi SDM & Umum Nomor 313/135.000/12/13/SDU perihal Usulan Penyesuaian Penghasilan Pegawai PKWTT dan PKWT dan memo Divisi SDM&Umum Nomor 314/314/135.000/12/14 perihal Addendum Perjanjian Kerjasama PT.Prima Utama Sultra</p>	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wd Nurhuma (Notulen)</p>

P e l a t i h a n		<p>9. Surat Pengurus Dana Pensiun PT.BPD Sultra Nomor 110/Dapen.BPDST/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Permohonan Persetujuan Peninjauan kembali honor Pengurus Dana Pensiun Bank Sultra.</p> <p>10.Memo Dlvsi Treasury Nomor 3566/135.000/12/14/TRS tanggal 16 Desember 2014 perihal Usulan Pemberian Souvenir Kantor Capem Kambara untuk Nasabah PNPM</p> <p>11.Memo Divisi Keuangan dan Akuntansi Nomor 3039/135.000/12/14/KEU perihal Pengakuan sebagai pendapatan Bank</p> <p>12.Invoice dari PT.Cyberport</p> <p>13.Draf akta pendirian yayasan Kesejahteraan Keluarga Besar PT.BPD Sultra</p> <p>14.Pengembangan wesbsite PT.BPD Sultra.</p>	
D i r e k s i	44. Selasa, 30 Desember 2014	Surat Dewan Komisaris PT.BPD Sultra Nomor 084/Dekom.BPD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Pembayaran Bonus tahun 2014.	<p>1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wd Nurhuma (Notulen)</p>

ahun 2014

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan lainnya yang dihadiri oleh Direksi selama tahun 2014, antara lain :

Tabel 7
Pelatihan Direksi Tahun 2014

Direksi	Materi Pelatihan	Penyelenggara	waktu Pelaksanaan
Khaerul Kemala Raden	1. Rapat Dengar Pendapat Rancangan OJK 2. Kosinyering Pembahasan BRC Jilid II	Bank Indonesia Asbanda	14-16 Sep 2014 23-24 Nov 2014
La Utu	1. Workshop Penjelasan Praktis Rencana Penerapan Basel III Dibawah OJK 2. Seminar Penerapan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumer Sektor Jasa Keuangan Khususnya Yang Terkait Dengan Perbankan 3. Workshop Aspek Hukum Perbankan dan Perkreditan Dikaitkan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Hukum (Refreshment SMR Level IV)	OJK FKDKP RMI	20-22 Apr 2014 10-12 Sep 2014 11-17 Des 2014
Hayati Hasan	1. Pembekalan Uji	Talents Ind	19-21 Mar 2014

	Kompetensi MR Level IV 2. UKMR Level IV	BSMR	22 Mar 2014
Depid	1. Pembekalan Uji Kompetensi MR Level IV 2. UKMR Level IV 3. Sespibank Angk 61	Talents Ind BSMR LPPI	19-21 Mar 2014 22 Mar 2014 18 Sep - 15 Nov 2014

Secara keseluruhan hasil *self assessment* pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi berada pada peringkat 1 (Sangat Baik), dimana semua anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang lain kecuali satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian *self assessment* tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang belum maksimal.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

A. Komite-Komite dibawah Komisaris

Sebagai bentuk implementasi dan kepatuhan pada ketentuan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu :

1. KOMITE AUDIT

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan. Susunan Komite Audit Bank Sultra posisi 31 Desember 2014 adalah :

Tabel 8
Susunan Komite Audit

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. H.Suma Sanggo	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	DR M. Natsir, SE, M.Si	Anggota	Pihak Independen
3.	DR. Sujono, SE, M.Si	Anggota	Pihak Independen

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi audit, termasuk kecukupan pelaporan.

- Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- Menganalisa/menelaah setiap surat/memo dari Direksi dan/atau pihak terkait lainnya dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Komite Audit.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap triwulan dan laporan akhir tahun kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Selama tahun 2014 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Realisasi dan Program Kerja Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2014 :

- Membahas dan mereview Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja SKAI PT.BPD Sultra

- Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern Bank Sultra
- Membahas dan mereview pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI, Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta otoritas lainnya.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris pemilihan auditor eksternal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan review Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pengelolaan Kredit Produktif pada Bank Sultra Tahun 2013 & Semester I 2014.

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sultra posisi 31 Desember 2014 adalah :

Tabel 9

Susunan Komite Pemantau Risiko

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. H. Jahja Mallisa	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen

2.	Karman, SE	Anggota	Pihak Independen
3.	Drs. La Atjeh Amin	Anggota	Pihak Independen

Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Komite Pemantau Risiko

- Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif oleh Direksi, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko yang ada.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- Mengevaluasi Laporan Profil Risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan komitmen yang dibuat Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya dan mengevaluasi pelaksanaan budaya perusahaan benar-benar telah berorientasi risiko.
- Menganalisa/menelaah setiap surat/memo dari Direksi dan/atau pihak terkait lainnya dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Komite Pemantau Risiko.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap triwulan dan laporan akhir tahun kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Selama tahun 2014 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali.

Realisasi dan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2014 :

- Membahas dan mereview Laporan Profil Risiko Bank Sultra setiap triwulanan
- Merekomendasikan hal-hal yang perlu mendapat perbaikan terhadap risiko-risiko yang tergolong tinggi
- Memberikan masukan terhadap rencana kerja tahunan pada bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko

3. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua dan 1 (satu) orang pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau perwakilan Pegawai yang harus memiliki pengetahuan mengenai sistem

remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra posisi 31 Desember 2014 adalah :

Tabel 10

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. H. Jahja Mallisa	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Kepala Divisi SDM & Umum Bank Sultra	Anggota	Pihak Independen

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi calon pihak independen yang dapat menjadi anggota komite.
- Menganalisa/menelaah setiap surat/memo dari Direksi dan/atau pihak terkait lainnya dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap triwulan dan laporan akhir tahun kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Selama tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.

Realisasi dan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2014 :

- Melakukan evaluasi Terhadap Kebijakan Remunerasi, Penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra
- Membahas Rencana pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direktur Pemasaran PT. BPD Sultra Tahun 2014.

4. Pelatihan Anggota Komite tahun 2014

Pelatihan/seminar/workshop yang dihadiri oleh anggota Komite selama tahun 2014 :

Tabel 11
Pelatihan Anggota Komite Tahun 2014

Anggota Komite	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
DR. Muh.Nasir	a. Penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan Efektif	Asbanda	06-09 Feb 2014
	b. Pembekalan Uji Kompetensi MR Level I	LMS	19-21 Feb 2014
DR. Sujono	Pembekalan Uji Kompetensi MR Level I	LMS	19-21 Feb 2014

B. Komite-Komite dibawah Direksi

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 005/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 09 Januari 2012 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti : Direktur Kepatuhan
Sekretaris merangkap Anggota: Kadiv Kepatuhan
Anggota : Direktur Pemasaran
Kepala Divisi Perkreditan
Kepala Divisi Treasury
Kepala Divisi TSI
Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi antara lain :

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency Plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan/penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya;
3. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposure risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan .

2. KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Komposisi keanggotaan Komite **Kebijakan Perkreditan (KKP)** Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 054/Kpts/Dir.PT.BPD/2014 tanggal 03 November 2014 sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Wakil Ketua : Direktur Pemasaran
Sekretaris merangkap Anggota: Kepala Divisi Perkreditan
Anggota : Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi
Ketua SKAI
Kabag. Manajemen Risiko
Kabag. Kepatuhan
Kabag Monitoring Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pemberian kredit;
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai yang ditetapkan dalam KPB;
 - g. Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
2. Melakukan kajian secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan system dan prosedur telah berjalan secara efektif atau perlu penyempurnaan.

3. Memberikan masukan kepada Direksi PT. BPD Sultra terutama mengenai masalah/hambatan pelaksanaan kebijakan perkreditan untuk dilakukan perbaikan.

Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit
2. Menetapkan kebijakan tentang penilaian agunan
3. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada pihak terkait, kelompok peminjam (debitur grup) dan/atau debitur besar;
4. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi;
5. Menetapkan kebijakan tentang kredit yang perlu dihindari;
6. Menetapkan kebijakan tentang penilaian kualitas kredit;
7. Menetapkan kebijakan tentang perangkat perkreditan;
8. Menetapkan kebijakan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Unit kerja Perkreditan dan Komite Kredit di bidang perkreditan.
9. Menetapkan kebijakan tentang persetujuan kredit yang meliputi :
 - a. Penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - b. Tanggung jawab pemutus kredit;
 - c. Proses persetujuan kredit;
 - d. Perjanjian kredit;
 - e. Persetujuan pencairan kredit.
10. Menetapkan kebijakan tentang Dokumentasi dan Administrasi kredit;
11. Menetapkan kebijakan tentang Pengawasan Kredit;
12. Menetapkan kebijakan tentang Penanganan Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku serta Kredit Hapus Tagih;

Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan Kepada Dewan Komisaris mengenai :

1. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Komite Kebijakan Perkreditan;
2. Memberikan saran perbaikan kepada Direksi.

3. KOMITE ALCO (*ASSET LIABILITY COMMITTEE*)

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO

Struktur keanggotaan Komite ALCO Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 012/Kpts/Dir.BPD/2013 tanggal 12 Februari 2013 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua	: Direktur Pemasaran Direktur Umum
Sekretaris	: Kepala Divisi Treasury
Anggota	: Kepala Divisi Perkreditan Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi Kepala Divisi Perencanaan&Pengembangan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Tugas Komite ALCO

1. Menetapkan tujuan ALMA (*Asset and Liability Management*) Bank, menyusun strategi dan kebijakan, memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan-kekayaan yang meliputi pendanaan, penempatan dana secara menguntungkan, menetapkan suku bunga pinjaman, Deposito, Tabungan dan Giro sesuai dengan ALMA.
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA, sesuai dengan tujuan dan perkembangan perbankan.
3. Menyiapkan dan menetapkan kebijakan dan petunjuk baru bila dianggap perlu.
4. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *Exposure Asset/Liability Management*.

5. Meninjau kembali prakiraan dan proyeksi untuk prakiraan suku bunga, deposito dan pinjaman serta prakiraan keadaan ekonomi.
6. Menetapkan petunjuk mengatur *exposure* dan memberikan limit untuk likuiditas bank, *gap management*, *earnings and investment goals*.
7. Menetapkan suku bunga pinjaman dan suku bunga dana.
8. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA.
9. Membuat program kerja SSG ALCO
10. Menetapkan batasan dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
 - Risiko Suku Bunga (*gap Management*)
 - Risiko Portofolio (*earnings and investment Management*)

Tanggungjawab Komite ALCO

1. Menetapkan kebijakan dan memberikan petunjuk mengenai penetapan portofolio *Asset & Liability* yang optimal tanpa melanggar ketentuan Bank Indonesia.
2. Menetapkan kebijakan dalam *pricing* guna mencapai *interest margin* yang berbeda.

4. KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 037/Kpts/Dir.PT.BPD/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Divisi Perkreditan
Sekretaris	: Kepala Bagian Pemasaran Kredit
Anggota	: Kepala Divisi Treasury
	: Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi

Kepala Divisi Perencanaan

Peninjau : Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit beserta pertimbangannya sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi serta melakukan koordinasi dengan Tim ALCO dalam rangka pendanaan perkreditan dan Batas Maksimum Pemberian Kredit, sedangkan wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit sebagai berikut :

1. Komite Kredit berwenang memberikan pendapat dan rekomendasi untuk pemberian kredit yang menjadi kewenangan Direksi.
2. Komite Kredit bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diatas berdasarkan kemahiran profesionalnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara jujur, obyektif dan cermat
 - b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak lain yang berkepentingan dengan permohonan kredit untuk memberikan rekomendasi yang bersifat formalitas
 - c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
 - d. Memastikan bahwa setiap kredit yang akan diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
 - e. Melakukan rapat Komite Kredit sebagai dasar pembuatan rekomendasi kepada Direksi dan hasil rapat dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat yang disahkan oleh semua personil Komite Kredit.

5. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah TI Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 020/Kpts.Dir/BPD/2012 tanggal 01 Maret 2012 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	: Direktur Umum
Wakil Ketua merangkap Anggota	: Direktur Kepatuhan
Sekretaris merangkap Anggota	: Kadiv Teknologi Sistem Informasi
Anggota	: Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi Kepala Divisi Perencanaan Kepala Divisi SDM & Umum Kepala Divisi Perkreditan Kepala Divisi Treasury Pemimpin Cabang Utama

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi yang yang tercantum dalam IT *Steering Committee Charter* adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c. Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal

(berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core Banking application*, *server production* dan topologi jaringan;

4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

C. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Dengan adanya perubahan status badan hukum PT.BPD Sultra, maka pada tahun 2014 dibentuk *Unit Corporate Secretary* dengan uraian tugas :

- Mengkoordinir penatalaksanaan *Office of the board* yang mencakup kepastian ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

- Mengkoordinir penatausahaan dokumen Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah rapat Direksi, risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Mengkoordinir dan menyiapkan segala kegiatan dan jadwal Direksi (protokol Direksi)
- Merencanakan dan mengembangkan pembentukan citra perusahaan, produk dan jasa
- Merencanakan dan mengembangkan aktifitas hubungan dengan masyarakat
- Menindaklanjuti pengaduan nasabah yang berkaitan dengan nama baik Bank
- Bertanggungjawab dalam memutakhirkan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan berikut pengadministrasiannya
- Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, berkoordinasi dengan Divisi Perencanaan
- Memfasilitasi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris
- Menjadi perwakilan Direksi untuk menghadiri rapat/acara/kegiatan lainnya bila Direksi berhalangan hadir
- Mengkoordinir penerbitan publikasi berupa brosur, *leaflet*, *prospectus*, *company profile* dalam rangka IPO dan penerbitan surat berharga lainnya
- Mengkoordinir pengelolaan *website* Bank
- Mengkoordinir pengelolaan setoran modal Pemegang Saham Bank
- Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan Bank yang akan dilaporkan kepada Bank Indonesia
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh Direksi dan Pejabat Eksekutif senantiasa mengungkapkan setiap konflik atau potensi konflik kepentingan yang mereka miliki tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan Bank dan/atau hal lainnya yang dibahas pada setiap pertemuan dan dituangkan dalam agenda rapat baik di tingkat Dewan Komisaris, Komite-komite maupun pada Manajemen Eksekutif, dan sepanjang tahun 2014 tidak terdapat peristiwa dan transaksi yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan pada Bank Sultra.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dan berdasarkan PBI No. 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI No. 1/6/PBI/1999 yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Bank Sultra telah memiliki seorang Direktur untuk memegang posisi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan peran dan tanggung jawab meliputi pemantauan dan menjaga agar setiap aktivitas operasional bank senantiasa berjalan sesuai Peraturan Bank Indonesia serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk dalam hal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka fungsi kepatuhan tersebut meliputi :

- Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan APU dan PPT, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan

mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan APU dan PPT ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

- Memantau dan memastikan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kewenangan lainnya.
- Memastikan bahwa semua laporan aktivitas dan langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaporkan telah dikirim ke Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya dan telah dilaporkan tepat waktu;
- Menyediakan pelatihan mengenai APU dan PPT bagi semua karyawan baru dan memberikan pelatihan penyegaran untuk semua front liner;
- Setiap bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris Bank Sultra;
- Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Bank membentuk suatu fungsi audit internal yang independen dari kegiatan yang mereka audit dan harus dilakukan secara independen dan profesional. Ketua audit internal bertanggung jawab atas review yang dilakukan secara reguler dan/atau menilai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sesuai dengan *Audit Charter*, SKAI memenuhi fungsinya sebagai Auditor Internal yang independen pada Satuan Kerja Operasional.

Ruang lingkup Audit intern meliputi semua kegiatan Bank. Hasil audit dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan pihak lain yang terkait (*auditee*).

Tindak lanjut atas temuan hasil audit oleh *auditee* dipantau dan dianalisis secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi dan pihak terkait lainnya (*auditee*).

Panduan Pemeriksaan (*audit charter*) SKAI

Panduan pemeriksaan (*audit charter*) SKAI Bank Sultra berisi hal-hal berikut :

- Latar Belakang, sebagai dasar penyusunan *audit charter*
- Visi, Misi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Kode Etik SKAI
- Standar Audit/Norma Pemeriksaan
- Perencanaan dan Pelaksanaan Audit.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Auditor Intern independen yang memiliki dedikasi dan profesional dalam melaksanakan tugas dan menjadi mitra dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja lainnya.

Misi

1. Dalam melaksanakan pemeriksaan senantiasa tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Informasi/data yang disajikan kepada pihak manajemen dan atau pihak lainnya yang membutuhkan adalah benar dan terkini

3. Melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam tata kelola bank khususnya pengamanan asset bank
4. Dalam memberikan penilaian tidak memihak, jujur dan adil.

Tugas

- Melakukan pemeriksaan kinerja setiap semester, hasilnya saran
- Melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, hasilnya kesimpulan
- Melakukan tugas diluar pemeriksaan yang diminta oleh Direktur Utama.

Wewenang

- Melakukan komunikasi lisan/tertulis dengan baik/efektif, baik dengan auditee maupun manajemen serta atas persetujuan Direktur Utama melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik)
- Meminta manajemen dan semua unit kerja untuk memberikan dukungan/kerjasama untuk kelancaran pemeriksaan
- Mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh, terutama dokumentasi fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan
- Menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilaksanakan
- Bebas dari campur tangan pihak manapun, sepanjang satuan dan auditor telah bekerja secara professional sesuai dengan tujuan penugasannya.

Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Organisasi

- Meyakinkan bahwa independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam semua tahap pemeriksaan.
- Meyakinkan bahwa pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.
- Meyakinkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yang kompeten.

- Secara periodik dan independen melakukan review hasil pemeriksaan.

Tanggung Jawab Auditor/Pemeriksa

- Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan
- Menggunakan informasi yang diperoleh secara hati-hati (tidak boleh menggunakan diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali dinyatakan lain)
- Mempertahankan independensi dalam sikap mental dan penampilan pada saat melaksanakan pemeriksaan
- Menggunakan pertimbangan professional dalam menetapkan lingkup, metodologi, pengujian dan prosedur, melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan
- Membantu manajemen/pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk memahami tanggung jawab pemeriksa/auditor .

Kode Etik SKAI

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Bank dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga merugikan profesi auditor intern atau Bank.
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan bank atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif.
5. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
6. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Auditor Intern, kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan.
7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat auditor intern.

8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi bank dengan alasan apapun.
9. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan bank atau dapat melanggar hukum.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Audit SKAI

Selama tahun 2014, tim auditor SKAI Bank Sultra telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dengan standar pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko (*risk based audit*) serta pemeriksaan khusus terhadap beberapa permasalahan internal. Laporan Hasil Pemeriksaan audit telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dewan Komisaris mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang akan melakukan audit laporan keuangan bank. Atas usulan tersebut disetujui KAP Drs.Bambang Sudaryono dan Rekan sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank Sultra Tahun Buku 2014.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. KAP Drs.Bambang Sudaryono dan Rekan terdaftar di Bank Indonesia dan independen terhadap Bank Sultra sehingga tidak memiliki konflik kepentingan.

Pada Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas operasional Bank Sultra yang difokuskan pada kegiatan pemberian Kredit dan Treasury. Selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan juga

melakukan pemeriksaan rutin atas kegiatan operasional secara kelesuruhan pada Bank Sultra.

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk memantau penerapan Manajemen Risiko. Beberapa tindakan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh Bank Sultra adalah meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengenali dan memahami risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Penerapan manajemen risiko Bank Sultra sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah berjalan cukup efektif dengan senantiasa memperhatikan pilar-pilar pengawasan dalam hal :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan identifikasi dan pengendalian semua risiko pada Bank melalui koordinasi, rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi meskipun belum maksimal
- Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, secara efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
- Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank
- Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
- Prosedur dan penerapan pengendalian intern pada Bank Sultra cukup komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta

risiko yang dihadapi. Beberapa Auditor telah bersertifikat dan pendidikan akan terus dilakukan guna mendukung daya saing SDM yang berkualitas, namun disisi lain masih terdapat kelemahan dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit

- Berdasarkan profil risiko Triwulan IV Tahun 2014, peringkat risiko Bank Sultra berada pada komposit **3 (*Moderate*)** dengan karakteristik bahwa dari risiko inherent kemungkinan kerugian yang akan dihadapi bank tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang dan dari kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai
- Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan Indonesia dan *corporate governance* serta sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Kursus/Program Sertifikasi Manajemen Risiko maka Bank Sultra telah mengikutkan para pengurus, pejabat bank dan karyawan bank pada level tertentu dalam program sertifikasi dimaksud yang diselenggarakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta program pemeliharaan sesuai tingkatan sertifikatnya. Sampai dengan 31 Desember 2014, pengurus, pejabat dan pegawai yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dimaksud terdiri dari :
 - a. Level 1 sebanyak 195 Orang
 - b. Level 2 sebanyak 115 Orang
 - c. Level 3 sebanyak 34 Orang
 - d. Level 4 sebanyak 4 Orang

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*Related Party*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*Large Exposure*)

Aktivitas penyediaan dana khususnya pemberian kredit, Bank Sultra senantiasa memenuhi unsur kepatuhan seperti :

- Menjunjung tinggi prinsip *Prudential Banking* dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan ketentuan serta peraturan lainnya yang berlaku dan secara teratur melaporkan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
- Sepanjang tahun 2014, tidak pernah melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK sesuai ketentuan.
- Telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Diversifikasi penyediaan dana kepada pihak terkait lebih dominan dalam sektor konsumtif dengan jumlah yang cukup signifikan dibanding total penyediaan dana yaitu Kredit Konsumtif (92,42%) dan Kredit Modal Kerja (7,58%), sedang penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Modal Kerja (68,52%) dan Kredit Investasi (31,48%).

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
dan Penyediaan Dana Besar

No.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH		Presentasi (%)
		DEBITUR	BAKI DEBET	

1.	Kepada Pihak Terkait			
	a. Kredit Konsumtif	48	Rp. 7.555.918.430,-	92.42 %
	b. Kredit Modal Kerja	2	Rp. 619.420.454,-	7.58 %
2.	Kepada debitur inti :			
	a. Kredit Modal Kerja	16	Rp. 53.848.207.439,-	68.52 %
	b. Kredit Investasi	15	Rp. 24.745.086.038,-	31.48 %

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

- Bank Sultra telah memberikan informasi tentang laporan keuangan dan non keuangan yang disusun dan disediakan dengan cara, jenis dan skala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta telah dilaporkan secara tepat waktu. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan kepada publik dapat diakses melalui *homepage* Bank Sultra (www.banksultra.co.id) maupun media secara transparan, sehingga mudah diakses oleh semua stakeholder.
- Cakupan informasi keuangan dan non keuangan Bank Sultra tersedia dalam *system core banking* yang telah dibangun dan dapat diakses oleh setiap pegawai dalam lingkup Bank Sultra.
- Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Sultra telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilaporkan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- Informasi Sistem manajemen mengenai laporan internal dilakukan sesuai prosedur serta disajikan secara tepat waktu, akurat dan memadai.

Hal lain yang dapat dijabarkan terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan kondisi lainnya pada Bank Sultra sebagai berikut :

a. Kepemilikan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2014, pemegang saham Bank Sultra adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, dimana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemegang saham terbesar dibanding pemegang saham lainnya dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 13
Komposisi Kepemilikan Saham

No.	PEMEGANG SAHAM	SETORAN MODAL (Rp)	%
1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	64.892.000,000.00	29.77%
2.	Kab. Bombana	30.591,000,000.00	14.03%
3.	Kab. Kolaka Utara	20.615.000,000.00	9.46%
4.	Kab. Wakatobi	20.296.000.000,00	9.31%
5.	Kab. Kolaka	19.196.000.000,00	8.81%
6.	Kab. Konawe Selatan	10.900.000.000,00	5.00%

7.	Kab. Buton	10.000.000.000,00	4.59%
8.	Kab. Muna	10.000.000.000,00	4.59%
9.	Kab. Konawe	7.735.000.000,00	3.55%
10.	Pemda Kota Bau-Bau	6.750.000.000,00	3.10%
11.	Kab. Buton Utara	6.000.000.000,00	2.75%
12.	Kota Kendari	5.001.000.000,00	2.29%
13.	Kab. Konawe Utara	4.000.000.000,00	1.84%
14.	Kab. Kolaka Timur	2.000.000.000,00	0.92%
JUMLAH		217.976.000.000,00	100.00%

oran modal

Yang belum mendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2014 adalah sebesar Rp.55.224.000.000,- termasuk saham dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah pemekaran baru di Sulawesi Tenggara dan pada saat pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2014 telah disahkan menjadi setoran modal, sehingga jumlah setoran modal bank setelah mendapatkan persetujuan RUPS menjadi sebesar Rp.273.200.000.000,-.

b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi atau hubungan lainnya. Oleh karena itu, Komisaris Independen maupun Direksi harus mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

Saat ini antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota lainnya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga, antara Direksi dengan Direksi lainnya tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, namun antara Pemegang Saham Pengendali dengan salah seorang Direksi Bank terdapat hubungan keluarga.

c. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan 31 Desember 2014 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan Dewan Pengawas dan telah mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sultra Tahun 2014 adalah :

1. Dewan Pengawas

1. Honorarium
2. Tunjangan Hari Raya
3. Jasa Produksi Tahun Buku 2013
4. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar

2. Direksi

1. Gaji
2. Bonus
3. Tunjangan Hari Raya
4. Uang cuti tahunan
5. Jasa Produksi Tahun Buku 2013
6. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar.
7. Rumah Dinas termasuk perabot untuk Direktur Utama
8. Biaya telephon
9. Perawatan Kesehatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji,			4	Rp. 4.596.994.197,-

bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	Rp. 1.522.799.544,-		
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*) :	2		4	
a. dapat dimiliki		a. Rp. -		a. Rp. -
b. tidak dapat dimiliki		b. Rp. 210.254.845,-		b. Rp. 709.410.252,-
Total	3	Rp. 1.733.054.389,-	4	Rp. 5.598.954.545,-

Selama tahun 2014, Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Tabel 15

Paket Remunerasi Yang Diterima Pada Tahun 2014

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp. 2 miliar	-	-
di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	3 orang	-
di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1 orang	2 orang
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*

) yang diterima secara tunai

d. *Share Options*

Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Bank, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Bank Sultra tidak terdapat opsi saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Kepala Unit Kerja lainnya.

Pengungkapan *share option* tahun 2014 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16

Pengungkapan *Share Option* Tahun 2014

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)	
Dewan Pengawas	--	--	--	--
Direksi	--	--	--	--
Pejabat Eksekutif	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

e. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan per bulan adalah sebagai berikut :

RASIO GAJI		
No.	URAIAN	RASIO
1.	Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	3,95 : 1
2.	Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,24 : 1
3.	Gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,52 : 1

Tabel 17

Rasio Gaji

f. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2014, terdapat 5 penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai tetap dimana 2 telah diselesaikan, 2 dalam proses penyelesaian internal bank, dan 1 telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Pengungkapan *internal fraud* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18

Jumlah Penyimpangan Internal

(kasus)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh				
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya
Total Fraud	--	--	--	5	1
Telah diselesaikan		--		2	1
Dalam proses penyelesaian diinternal Bank	--	--	--	2	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	-	-	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		--		1	

g. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2014 sebanyak 8 kasus perdata yang dihadapi, dan semua masih dalam proses penyelesaian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19

Jumlah Permasalahan Hukum

(kasus)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	--	--
Dalam proses penyelesaian	8	--
Total	8	--

h. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank yang pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki	Nama dan Jabatan		Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	

	Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi		Keterangan
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2014, Bank Sultra belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back* Obligasi pada Bank Sultra.

j. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), Bank Sultra berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan/pendidikan, olahraga, lingkungan dan bidang lainnya dengan total dana CSR yang disalurkan selama tahun 2014 sebesar Rp.1.006.995.000,- (satu milyar enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Tabel 21

Penyaluran Dana CSR Tahun 2014

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Bidang Pendidikan	Rp. 335.250.000,-

2.	Bidang Kesehatan	Rp. 6.634.000,-
3.	Bidang Keagamaan	Rp. 202.840.000,-
4.	Bidang Sosial Kemasyarakatan	Rp. 365.034.000,-
5.	Bidang Olah Raga	Rp. 65.250.000,-
6.	Bidang Lingkungan	Rp. 3.812.000,-
7.	Bidang lainnya	Rp. 28.175.000,-
Jumlah		Rp.1.006.995.000,-

k. Budaya Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan budaya perusahaan melalui perilaku utama yang ditunjukkan oleh setiap karyawan di lingkungan Bank, maka pada tanggal 06 April 2013 telah dilakukan launching Budaya Kerja dan Grooming Perusahaan. Budaya Perusahaan diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi Bank yang tertuang pada serangkaian Nilai-Nilai Inti (*Core Values*) dan Perilaku Utama yang disepakati dan berupaya untuk diaktualisasikan dalam lingkungan Bank Sultra terutama pada setiap individu.

Nilai-Nilai Inti Budaya Perusahaan Bank Sultra yaitu *Trust, Integrity, Professional, Synergy, Service Excellence* yang disingkat dengan “**TIPSS**”. Budaya Perusahaan akan terwujud menjadi karakter unggul PT. BPD Sultra yang dapat dilihat secara kasat mata melalui kebiasaan, keyakinan dan simbol-simbol. Nilai-nilai inti Budaya Perusahaan tersebut diwujudkan melalui Perilaku Utama yang ditunjukkan oleh setiap karyawan di lingkungan Bank.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya3. Mengutamakan keterbukaan
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none">1. Jujur2. Adil dan bijaksana3. Bertanggung jawab
PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kompetensi2. Disiplin

	3. Inovatif & Kreatif
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi efektif 2. Saling mendukung & menghargai 3. Membangun jaringan
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat 2. Memahami kebutuhan pelanggan 3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan

Pengertian Perilaku Utama dalam Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sultra meliputi:

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> o Sesuai dengan undang-undang, menjaga rahasia bank berarti menjaga rahasia segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan termasuk proses dan rahasia nasabah, sedangkan perusahaan dalam hal ini adalah Bank Sultra. 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling

	<p>percaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Membangun hubungan dengan semua pihak berdasarkan itikad baik dan saling menghargai. <p>3. Mengutamakan keterbukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan secara proporsional sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dengan tetap menjaga kerahasiaan bank dan perusahaan.
<p>INTEGRITY</p>	<p>1. Jujur</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dapat dipercaya, selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. ○ Menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kode etik. ○ Berbicara secara realistik didukung dengan fakta dan data <p>2. Adil dan bijaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berperilaku dan memperlakukan orang lain secara setara dan proporsional. ○ Menghargai persamaan hak dan kewajiban. ○ Mempertimbangkan segala sesuatu secara obyektif sebelum mengambil keputusan / bertindak. <p>3. Bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan perusahaan.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil
<p style="text-align: center;">PROFESSIONAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> ○ Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dalam keterampilan, pengetahuan, dan keahlian baik secara formal maupun informal untuk terus berprestasi 2. Disiplin <ul style="list-style-type: none"> ○ Menghargai waktu dalam menjalankan tugas. ○ Secara konsisten menjalankan peraturan perusahaan. ○ Memiliki komitmen terhadap tugas dan pekerjaan 3. Inovatif & Kreatif <ul style="list-style-type: none"> ○ Menghargai ide-ide untuk perbaikan. ○ Selalu menumbuhkan rasa ingin tahu dan bersikap terbuka terhadap perubahan. ○ Proaktif mengembangkan peluang untuk perbaikan.
<p style="text-align: center;">SYNERGY</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi efektif <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyampaikan informasi dan/atau gagasan dengan efektif dan terbuka. ○ Bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. ○ Memberikan akses informasi bagi setiap

**SERVICE
EXCELLENCE**

orang dalam perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku.

2. Saling mendukung & menghargai

- Mau bekerja sama dengan orang lain dan membangun semangat kebersamaan untuk meraih keberhasilan.
- Mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan.
- Memberikan penghargaan atas prestasi.
- Memberdayakan orang lain untuk maju.

3. Membangun jaringan

- Memperluas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan untuk memberikan hasil optimal baik terhadap individu, team kerja, dan perusahaan.

1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat

- Melakukan pekerjaan dengan cepat sesuai dengan batasan waktu, menggunakan cara/metode yang tepat dan meminimalisasi tingkat kesalahan dengan meningkatkan ketelitian.

2. Memahami kebutuhan pelanggan

- Menghormati dan memberikan perhatian kepada nasabah sebagai mitra.
- Selalu mengupayakan solusi terbaik bagi nasabah.

3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merupakan ciri khas pelayanan bank Sultra dengan senantiasa melayani dengan baik untuk menjamin kepuasan nasabah dan memperlakukan nasabah sebagaimana layaknya keluarga dengan tetap memperhatikan aspek-aspek profesional.
--	--

Beberapa Contoh Perilaku yang mencerminkan TIPSS yang dilaksanakan di lingkungan Bank Sultra antara lain :

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Contoh Perilaku
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Informasi Nasabah 2. Menjaga kepercayaan dalam hal pribadi / individu sbg cermin perusahaan 3. Terbuka tanpa mengorbankan kerahasiaan bank
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia menerima koreksi / kritik yang membangun 2. Adil & Bijaksana dalam membuat suatu keputusan 3. Mampu mengambil kebijaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menghadapi hal-hal khusus

PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus menerus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak hanya melalui training namun juga melalui kegiatan non training seperti coaching, proyek khusus dll. 2. Disiplin dalam hal kehadiran, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Memberikan masukan/ide untuk perbaikan baik untuk produk, layanan atau proses bisnis
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan komunikasi / sosialisasi sebelum pemberlakuan peraturan/ketentuan baru 2. Mempererat kerjasama antar departemen/seksi/unit kerja 3. Membangun/memanfaatkan jaringan individu karyawan (baik operasional maupun non operasional) untuk meningkatkan bisnis perusahaan baik
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standard pelayanan (SLA) untuk proses bisnis kunci. 2. Meningkatkan pelayanan di Customer service

I. Penerapan Strategi Anti Fraud dan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Pedoman Strategi Anti Fraud

Pedoman *Good Corporate Governance* mensyaratkan perlunya pengendalian internal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Bank Sultra menyadari pentingnya tanggung jawab dalam melindungi aset dan seluruh simpanan nasabah.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, maka Bank Sultra telah memberlakukan Pedoman

Penerapan Strategi Anti Fraud melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 146/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 29 Mei 2012.

Penerapan Strategi *Anti Fraud* ini dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud yang mencakup *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
2. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka identifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi) sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.
4. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindaklanjut.
5. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian melalui upaya-upaya pencegahan, mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

Struktur strategi *anti fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasi strategi *anti fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi yang saling berkaitan, yaitu :

- Pencegahan;
- Deteksi;
- Investigasi, Pelaporan dan Sanksi;
- Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut.

Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing System*)

Sebagai implementasi dan rangkaian dari kebijakan Anti Fraud, Bank Sultra telah membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing System*) yang merupakan bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan sebagai panduan bagi *stakeholders* dalam mekanisme pengaduan pelanggaran dan mekanisme perlindungan bagi pelapor.

Mekanisme pelaporan pelanggaran pada Bank Sultra menerapkan azas kerahasiaan, tidak diskriminatif dan perlindungan.

Penanggung jawab WBS di Bank Sultra adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Kepala SKAI sebagai Pengelola WBS. Pengelola WBS adalah penanggungjawab pelaksanaan WBS di Bank Sultra yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS Bank Sultra yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/pengangkatan Petugas WBS Bank Sultra tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan atas usul dari Pengelola WBS.

Bank Sultra menyediakan sarana pelaporan yang independen dan rahasia meliputi:

Telepon : 0815 257 00 331

Email eksternal : whistleblower@banksultra.co.id

Email internal : whistleblower

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank Sultra baik rencana jangka panjang (*corporate plan*) maupun rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) disusun berdasarkan asumsi-asumsi secara realistis serta pencapaian kinerja sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian.

11.1 Rencana jangka panjang (*corporate plan*)

Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank Sultra adalah :

- Menjadi bank umum nomor 1 di Sulawesi Tenggara.
- Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat, stabil dan tumbuh secara wajar.
- Meningkatkan Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan Bank.
- Target modal dasar bank terpenuhi sampai tahun 2018 yaitu sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
- Penerimaan gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten/Kota dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara melalui Bank Sultra.
- Meningkatkan akses masyarakat di Sulawesi Tenggara terhadap layanan perbankan.
- Memiliki sumber daya manusia yang professional, baik kuantitas maupun kualitas.
- Produk Bank yang lebih beragam dan bersaing.
- Memiliki teknologi yang handal sesuai kebutuhan konsumen.

- Pengembangan sistem pembayaran seperti *Payment point* (Telkom dan PLN), *Electronic Data Capture* (EDC), dan Kartu Kredit.
- Pembukaan Unit Usaha Syariah.
- Menjadi Apex BPR di Sulawesi Tenggara

11.2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*)

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek (*business plan*) Bank Sultra adalah :

1. Mengupayakan penambahan modal dari *stakeholders* dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014.
2. Mengupayakan portofolio kredit konsumsi dan kredit produktif tahun 2014 masing-masing sebesar 80% dan 20%.
3. Mendorong dan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
4. Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit hapus buku
5. Meningkatkan porsi dana non Pemda dengan tidak mengurangi dana Pemda itu sendiri. Portofolio dana non Pemda dan dana Pemda tahun 2014 masing-masing sebesar 65% dan 35%.
6. Menciptakan produk unggulan dan jasa yang dapat digunakan secara luas sesuai kebutuhan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi.
9. Pembangunan tahap awal Tower Bank Sultra.

Langkah strategis ditempuh Bank Sultra untuk merealisasikan Visi dan Misi adalah :

A. Ketahanan Kelembagaan yang kuat

- Penambahan modal dari *stakeholders* dalam hal ini Pemerintah Daerah
- Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit hapus buku
- Meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam pemberian kredit sampai kredit selesai.
- Mengembangkan Teknologi Informasi secara independen
- Tersedianya SDM yang memiliki kualitas, integritas dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan dan struktur organisasi.

B. Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*

- Pertumbuhan kredit sekurang-kurangnya 20% per tahun secara konsisten dengan portofolio kredit produktif tiap tahunnya meningkat sebesar 5%-10% sampai tahun 2016 dengan total sebesar 35%.
- *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berada pada level 78%-100%.
- Memiliki *Return On Asset* (ROA) minimal 4.36%.
- Menciptakan produk dan jasa serta layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat.
- Melakukan kerjasama dengan Bank lain dalam bentuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
- Memperluas jaringan kantor di Wilayah Sulawesi Tenggara melalui pembukaan kantor di daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi yang baik serta penempatan mesin ATM di tempat-tempat strategis.
- Menjadi APEX BPR melalui penyaluran kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dianggap sehat yang berada di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh bank-bank komersial sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran kredit kepada masyarakat.

C. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat

- Meningkatkan pemahaman terhadap produk-produk keuangan melalui edukasi kepada masyarakat.
- Mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya terutama kepada masyarakat kecil dan masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan.
- Melakukan *recruitment* pegawai dengan melakukan *asesment* jumlah maupun kualitas calon pegawai yang dibutuhkan.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan melalui *in house training* untuk meningkatkan *soft skill* pegawai serta terus meningkatkan budaya kerja perusahaan dalam segala aktivitas kerja pegawai.
- Memaksimalkan peran Bank Sultra sebagai konsultan keuangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG pada Bank Sultra dapat disimpulkan bahwa hasil *self assessment* yang dilakukan Bank Sultra berada pada peringkat “BAIK” dengan nilai komposit 1.57 dengan matriks ringkasan perhitungan nilai komposit *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah :

No.	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	1.68	0.17
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20.00%	1.32	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2.60	0.26
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1.89	0.19

5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	1.33	0.07
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2.02	0.10.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1.00	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	1.78	0.13
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	1.11	0.08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal.	15.00%	1.18	0.16
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	1.49	0.07
	NILAI KOMPOSIT	100.00%		1.57

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian *Good Corporate Governace*, disimpulkan bahwa:

Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris :
 - a. Semua Dewan Komisaris berdomisili di indonesia
 - b. Dewan Komisaris yang ada tidak merangkap jabatan pada Lembaga/Perusahaan lain dan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank
 - c. Komisaris independen merangkap jabatan sebagai ketua komite manajemen risiko dan komite nominasi dan remunerasi
 - d. Tidak ada hubungan keluarga antara komisaris dan direksi
 - e. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah disahkan sejak tahun 2007
 - f. Seluruh anggota Dewan Komisaris lulus *fit and proper test* dan selalu mengikuti workshop, seminar maupun lokakarya dalam rangka peningkatan kualitas.
 - g. Salah seorang anggota Dewan Komisaris berasal dari mantan Direksi namun telah menjalani masa tunggu lebih dari 1 tahun.
 - h. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali dari Bank
 - i. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya

- j. Pada tahun 2014 anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan Pengendalian Risiko, penyusunan laporan Dekom, pembekalan dan uji Kompetensi MR dan sosialisasi LHBU
 - k. Komposisi Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan BI.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :
 - a. Pada akhir tahun 2014, Jumlah direksi adalah 4 orang.
 - b. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia
 - c. Seluruh direksi tidak rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan, atau lembaga lain.
 - d. Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain.
 - e. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, namun terdapat 1 anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - f. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi
 - g. Pedoman dan Tata Kerja Direksi telah disahkan dan diberlakukan
 - h. Anggota Direksi tidak menggunakan penasehat atau jasa profesional sebagai konsultan
 - i. Semua anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. LHKPN seluruh anggota Direksi telah dilaporkan pada instansi yang berwenang dan dipublikasikan.
 - j. Direktur Utama Bank Sultra berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
 - k. Semua anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia
 - l. Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - m. Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan tentang perbankan

- n. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 - o. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Komite Audit diketuai oleh Dewan Komisaris Independen
 - b. Anggota Komite Audit adalah Independen dan Pihak independen
 - c. Komite Audit memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik
 - d. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen
 - e. Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen
 - f. Komite Pemantau Risiko memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik menjadi syarat untuk menjadi anggota Komite Pemantau Risiko
 - g. Komite Remunerasi dan nominasi diketuai oleh Dewan Komisaris Independen
 - Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Bagian Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional
 - b. Pengangkatan, pemberhentian Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 - c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan
 - Penerapan Fungsi Audit Intern
 - a. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Bank telah menyusun Piagam Audit Intern dan telah dikinikan pada tahun 2012, membentuk SKAI, serta telah menyusun panduan audit intern
 - c. SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional
 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 - Akuntan Publik yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan
 - Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - a. Bank menyusun laporan GCG setiap akhir tahun buku dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku
 - b. Laporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi bank yang memadai
 - c. Sistem informasi manajemen telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security sistem memadai
- Rencana Strategis Bank
 - a. Bank Sultra telah menyusun *Corporate plan* dan business plan
 - b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik

Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a. Jumlah anggota Dewan komisaris adalah 2 atau belum memenuhi standar minimum sesuai ketentuan
 - b. Jumlah anggota Dewan komisaris Bank Sultra per 31 Desember 2014 adalah 2, dan keduanya adalah komisaris independen
 - c. Komposisi Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan BI
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi memenuhi persyaratan 5 tahun sebagai pejabat eksekutif
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Anggota Komite Audit memiliki keahlian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
 - b. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

- c. Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi belum memenuhi ketentuan
- d. Pejabat Eksekutif ataupun perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi belum ada yang memilikisertifikat/pendidikan tentang remunerasi
- e. Anggota komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Des 2014 hanya 2 orang yaitu 1 orang Dewan Komisaris Independen dan 1 orang Pejabat Eksekutif
- Penanganan Benturan Kepentingan
Pedoman kebijakan, sistem dan prosedur tentang penyelesaian benturan kepentingan diatur dalam Pedoman GCG Bank Sultra, namun dalam pelaksanaannya pengungkapan benturan kepentingan belum sepenuhnya termuat dalam risalah rapat
- Penerapan Fungsi Audit Intern
Sumberdaya audit internal belum sepenuhnya menguasai bidang tugasnya, namun telah dilakukan pendidikan yang berkelanjutan.
- Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko telah dibentuk sesuai struktur organisasi Bank Sultra namun belum berfungsi secara optimal.
 - b. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko namun dalam penerapannya belum dilakukan dengan maksimal.
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Transparansi dan Kondisi Keuangan serta non keuangan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

Governance Process

Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi serta telah memperoleh persetujuan dari RUPS
- b. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Bank, pengambilan keputusan dilakukan oleh Direksi, namun untuk pemberian kredit kepada pihak terkait harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- c. Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan bank.
- d. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
- e. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Pengangkatan anggota komite dilakukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
- g. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi
- h. Dewan Komisaris hanya menikmati fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS
- i. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Direksi telah mengangkat anggota komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
 - b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa kepada pihak lain.
 - c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan Bank
 - d. Direksi dalam mengelola Bank telah sesuai dengan Wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - e. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham

- f. Penyediaan data Bank dapat diakses melalui jaringan sehingga Dewan Komisaris dapat mengakses kapan saja saat dibutuhkan
- g. Kebijakan dan keputusan strategis Direksi diputuskan melalui rapat Direksi
- h. Tidak ada Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi
- i. Tidak ada Direksi yang mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan
- j. Tidak ada intervensi pemilik modal terhadap pelaksanaan tugas Direksi
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - Penunjukan KAP telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit
- Penanganan Benturan Kepentingan
 - Selama tahun 2014 tidak terdapat kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Selama tahun 2014, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan dan memastikan setiap kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui hasil kajian yang disampaikan kepada unit kerja terkait. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dikirim ke Bank Indonesia setiap semester dan ke Direktur Utama setiap bulan
 - b. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Pedoman kerja Direktur Kepatuhan disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 - a. Akuntan Publik yang ditunjuk Bank telah terdaftar di Bank Indonesia.
 - b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Akuntan publik telah bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

- d. Hasil Audit dan Management Letter telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian
 - b. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal
 - a. Laporan keuangan telah dipublikasikan secara triwulanan melalui media yang ditetapkan dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Bank telah menyampaikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia dan otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia
 - d. Penyusunan dan penyajian laporan transparansi telah disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia
 - e. Penyusunan Laporan GCG telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah dipublikasikan tepat waktu melalui home page Bank.
 - f. Jika terdapat perbedaan peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian self assessment yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan dilakukan revisi sesuai dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan hasil revisi tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui home page Bank.
- Rencana Strategis Bank
Penyusunan rencana bisnis bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris

Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Penerapan pelaksanaan GCG dalam seluruh kegiatan Bank Sultra belum sepenuhnya dimengerti oleh semua unit kerja pada setiap jenjang organisasi
- b. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi namun belum maksimal
- c. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis namun belum maksimal
- d. Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan pertemuan untuk membahas laporan audit, namun tindak lanjut penyelesaiannya belum maksimal.
- e. Komite-Komite telah menjalankan tugasnya namun belum maksimal, dimana tahun 2014 pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi hanya sebanyak 2 (dua) kali
- f. Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) PT. BPD Sultra telah disusun pada Tahun 2014.
- g. Selama tahun 2014 rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dan sebagian besar hanya dilakukan oleh 2 anggota Dewan Komisaris
- h. Pengambilan keputusan dalam rapat sebagian besar hanya dilakukan 2 orang Dewan Komisaris yang masih menjabat
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Direksi telah melaksanakan prinsip GCG namun belum sepenuhnya dituangkan di setiap kegiatan
 - b. Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya.
 - c. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat, namun belum memuat dinamika rapat tersebut.
 - d. Risalah Rapat belum memuat evaluasi tindak lanjut atas keputusan/ hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit
 - a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dan tindak lanjut namun belum maksimal

- b. Komite Audit belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan.
 - c. Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin namun belum maksimal
 - d. Evaluasi kebijakan remunerasi untuk pejabat eksekutif dan pegawai tidak ada.
 - e. Komite Remunerasi dan Nominasi belum menyusun prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - f. Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi namun penyampaiannya belum sesuai dengan prosedur.
 - g. Komite Nominasi belum memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan namun belum maksimal
 - Penerapan Fungsi Audit Intern
 - a. Secara umum struktur pengendalian intern dalam setiap tingkat manajemen telah berjalan walaupun belum maksimal. Dewan Komisaris, belum maksimal dalam memberikan arahan dan review atas tindak lanjut hasil temuan SKAI
 - b. Bank telah menerapkan fungsi audit intern namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang belum dilaksanakan secara optimal
 - c. Bank telah melakukan kaji ulang oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sekali
 - d. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal, penyusunan rencana pemeriksaan SKAI Bank belum sepenuhnya mengacu pada PBI tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, kecukupan ruang lingkup audit dan kedalaman pemeriksaan SKAI belum dilakukan secara optimal

- e. Rencana pemeriksaan SKAI belum sepenuhnya terealisasi dengan baik terutama dari sisi waktu pelaksanaan pemeriksaan
- f. Anggota SKAI diikutkan dalam pendidikan audit secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia namun hasil dari pendidikan tersebut belum diterapkan secara optimal
- g. SKAI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun belum dilakukan secara optimal.
- h. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan perkembangan tindak lanjut belum maksimal
- i. Pengkinian sistem dan prosedur kerja belum dilaksanakan secara berkala
- Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. Kebijakan manajemen risiko telah disetujui Dewan Komisaris, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan belum maksimal dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis
 - b. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan terkait penerapan manajemen risiko, serta memastikan seluruh risiko material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Namun dari segi pengkinian kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko belum dilakukan dalam frekuensi yang sering.
- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank memiliki kebijakan & prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar serta telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
- Rencana Strategis Bank
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan prinsip kehati-hatian namun tidak diikuti dengan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Telah melaksanakan rencana bisnis bank secara efektif

- b. Bank mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi sedang kepada pemegang saham belum sepenuhnya dilakukan
- c. Telah melaksanakan rencana bisnis bank namun belum optimal
- d. Penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari sisi komitmen pelaksanaannya
- e. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank namun belum maksimal
- f. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung rencana strategis bank, namun belum optimal.

Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam laporan pelaksanaan GCG yang dimuat dalam laporan tahunan maupun laporan pelaksanaan GCG, telah diungkapkan: Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, remunerasi dan fasilitas lain diungkapkan dalam laporan tahunan.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Pelaksanaan Tugas Direksi dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahun Buku 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2015
 - b. Pertanggungjawaban Direksi telah diterima oleh pemegang saham
 - c. Dalam laporan pelaksanaan GCG telah termuat bahwa Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sultra, pada Bank atau perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. Terdapat salah satu anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali
 - d. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank telah ditunjukkan dari peningkatan kinerja perusahaan.

- e. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seluruh karyawan bank telah ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan
- Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik
 - b. Selama tahun 2014 tidak terdapat benturan kepentingan
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama setiap bulan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Pihak Lainnya serta kepada Bank Indonesia setiap semester.
 - b. Laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- Penerapan fungsi audit intern
 - a. Hasil temuan audit intern bank telah disampaikan dalam RUPS sebagai pertanggungjawaban Direksi.
 - b. SKAI telah obyektif dalam melakukan audit
- Penerapan fungsi audit ekstern
 - a. Hasil audit dan management letter telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Auditor bertindak obyektif dalam bekerja
- Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko
 - b. Bank melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan kemampuan permodalan bank
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Laporan yang dimaksud tersebut telah disampaikan secara tepat waktu
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
 - a. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara tepat waktu kepada pemegang saham dan berbagai lembaga sesuai ketentuan.
 - b. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulan telah dimuat dan dipublikasikan secara tepat waktu melalui homepage bank dan surat kabar.
 - c. Laporan GCG telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dilengkapi dengan self assesment Bank serta cakupan isi laporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan berbagai lembaga yang berkepentingan'
 - e. Telah dipublikasikan melalui homepage bank secara tepat waktu
- Rencana Strategis Bank
 - a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris
 - b. Rencana bisnis bank telah menggambarkan pertumbuhan bank secara kesinambungan
 - c. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a. Dalam dokumentasi risalah rapat tidak terdapat pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris, didokumentasikan dalam 1 file.
 - c. Hasil rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

- d. Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank namun hasil dari peningkatan kemampuan tersebut belum diaplikasikan secara maksimal dalam bidang pengawasan
- e. Pemilik modal utama Bank Sultra merupakan Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan terjadi intervensi pemilik modal terhadap komposisi dan atau/ pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian belum diungkapkan secara transparan melalui media yang dapat diakses oleh semua pegawai.
 - b. Arah bisnis bank telah dikomunikasikan kepada pegawai namun implementasinya belum optimal
 - c. Hasil rapat dituangkan dalam risalah dan telah didokumentasikan dengan baik, namun pengungkapan *disenting opinion* tidak tergambar dalam risalah tersebut
 - d. Bank mengikutkan karyawan dalam pendidikan dan sertifikasi serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan namun belum merata kepada semua karyawan.
 - e. Pemilik modal utama Bank Sultra merupakan Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan terjadi intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau/ pelaksanaan tugas Direksi
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik namun tidak menggambarkan adanya *dissenting opinions*.
 - b. Pelaksanaan fungsi pada beberapa komite belum berjalan secara optimal
- Penanganan Benturan Kepentingan
 - Telah diungkapkan dalam setiap keputusan namun belum dituangkan dalam risalah rapat.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- a. Bank telah berusaha menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku namun belum maksimal, kuantitas pelanggaran yang terjadi selama tahun 2014 cukup banyak
- b. Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional bank namun dalam pelaksanaannya belum maksimal
- Penerapan fungsi audit intern
 - a. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang.
 - b. Pelaksanaan program audit telah mempertimbangkan tingkat risiko dan program audit telah sesuai dengan prinsip SPFAIB namun jumlah dan kualitas auditor intern belum terpenuhi
- Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur namun pelaksanaannya belum maksimal.
- Rencana strategis Bank
 - a. Bank mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi sedang kepada pemegang saham belum sepenuhnya
 - b. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholders*
 - c. Rencana strategis bank telah disusun berdasarkan analisis SWOT melalui kajian yang cukup komprehensif
 - d. Rencana strategis Bank belum sepenuhnya didukung dengan infrastruktur yang memadai
 - e. Pemilik mampu dalam mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk

Demikian laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2014, untuk diketahui.

<p style="text-align: center;">Mengetahui :</p> <p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAEAH SULAWESI TENGGARA</p> <p><u>JAHJA MALLISA</u> <u>SUMA SANGGO</u></p> <p>Komisaris Komisaris</p>	<p style="text-align: center;">Kendari, 18 Mei 2015</p> <p style="text-align: center;">PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA</p> <p><u>KHAERUL K. RADEN</u> <u>L A U T U</u></p> <p>Direktur Utama Direktur Kepatuhan</p>
--	--